

Pengaruh Rasio Kemandirian, Rasio Efektivitas PAD, Rasio Efisiensi Belanja, dan Rasio Efisiensi Keuangan terhadap Dana Insentif Fiskal pada Pemerintah Provinsi di Indonesia

Nadiyya Amanda Putri, Bainil Yulina, Yevi Dwitayanti

Politeknik Negeri Sriwijaya, Palembang, Indonesia

nadiyyaamd7@gmail.com, byulina@gmail.com, yevi_dwitayanti@polsri.ac.id

ABSTRACT

The study aims to determine the effect of the Independence Ratio, the PAD Effectiveness Ratio, the Expenditure Efficiency Ratio, and the Financial Efficiency Ratio on Fiscal Incentive Funds partially and simultaneously in Provincial Governments in Indonesia in 2021-2023. The type of data used in this study is secondary data obtained from Provincial LKPD data in Indonesia for the 2021-2023 period sourced from the official website of the Supreme Audit Agency of the Republic of Indonesia (BPK RI). The method in this study is quantitative. The population in this study was 38 Provinces in Indonesia and used a purposive sampling technique to obtain a sample of 20 Provinces. The data analysis technique applied for this study was multiple linear regression analysis using IBM SPSS Version 26. The results of the study show that the Independence Ratio and the PAD Effectiveness Ratio have a positive and significant effect on Fiscal Incentive Funds, the Expenditure Efficiency Ratio has a negative and significant effect on Fiscal Incentive Funds, while the Financial Efficiency Ratio has no effect on Fiscal Incentive Funds. The Independence Ratio, PAD Effectiveness Ratio, Expenditure Efficiency Ratio, and Financial Efficiency Ratio simultaneously have a positive and significant effect on Fiscal Incentive Funds.

Keywords: *Independence Ratio; Local Own-Source Revenue Effectiveness Ratio; Spending Efficiency Ratio; Financial Efficiency Ratio; Fiscal Incentive Fund.*

ABSTRAK

Penelitian mempunyai tujuan guna mengetahui pengaruh Rasio Kemandirian, Rasio Efektivitas PAD, Rasio Efisiensi Belanja, serta Rasio Efisiensi Keuangan terhadap Dana Insentif Fiskal secara parsial dan simultan pada Pemerintah Provinsi di Indonesia tahun 2021-2023. Jenis data yang dipakai pada penelitian yakni data sekunder didapatkan dari data LKPD Provinsi di Indonesia periode 2021- 2023 yang bersumber dari diraih resmi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Metode pada penelitian ini yakni kuantitatif. Populasi pada penelitian ini sebanyak 38 Provinsi di Indonesia serta memakai teknik *purposive sampling* sehingga diraih sampel sebanyak 20 Provinsi. Teknik analisis data yang diterapkan untuk penelitian ini yakni analisis regresi linear berganda memakai IBM SPSS Versi 26. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa Rasio Kemandirian dan Rasio Efektivitas PAD menyumbang pengaruh positif serta signifikan pada Dana Insentif Fiskal, Rasio Efisiensi Belanja menyumbang pengaruh negatif serta signifikan pada Dana Insentif Fiskal, sementara Rasio Efisiensi Keuangan tidak menyumbang pengaruh terhadap Dana Insentif Fiskal. Rasio Kemandirian, Rasio Efektivitas PAD, Rasio Efisiensi Belanja, dan Rasio Efisiensi Keuangan secara simultan menyumbang pengaruh positif serta signifikan pada Dana Insentif Fiskal.

Kata kunci: Rasio Kemandirian; Rasio Efektivitas PAD; Rasio Efisiensi Belanja; Rasio Efisiensi Keuangan; Dana Insentif Fiskal.

PENDAHULUAN

Semenjak dikeluarkannya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 terkait Otonomi Daerah, Indonesia yang sebagian besar urusan pemerintahnya ditangani oleh pemerintah pusat mulai memasuki era otonomi daerah dan desentralisasi fiskal (Difinubun dkk. 2023). Dengan adanya Undang-Undang ini, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengelola sendiri urusan wilayahnya, termasuk keuangan daerahnya. Dalam membagikan pelayanan kepada masyarakat, pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab yang begitu besar dan wajib mempertimbangkan kondisi keuangan daerah yang ada (Aryasi dkk. 2023). Untuk menjalankan pengelolaan keuangan yang efektif, pemerintah daerah memerlukan informasi keuangan yang terdapat pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) (Mahmudi, 2019). Laporan keuangan tersebut berfungsi menggambarkan kondisi serta kinerja keuangan pemerintah, yang selanjutnya dapat dijadikan dasar untuk mengambil keputusan kebijakan fiskal yang tepat dan akurat.

Upaya pemerintah daerah untuk menyusun laporan keuangan yang mempunyai kualitas dilaksanakan untuk memperlihatkan kinerja yang baik. Sebagai bentuk dukungan terhadap kinerja pemerintah daerah, pemerintah pusat menyediakan sistem reward atau penghargaan yang didasarkan pada Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 terkait Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat serta Pemerintahan Daerah. Bentuk penghargaan ini adalah Dana Insentif Daerah (DID) yang kemudian berubah nama menjadi Dana Insentif Fiskal (DIF) pada tahun 2023. Tujuan dari insentif ini adalah “Untuk memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah yang berkinerja baik, mendorong peningkatan kinerja pada pengelolaan keuangan daerah, pelayanan pemerintahan umum, pelayanan dasar publik, serta upaya membuat meningkat kesejahteraan masyarakat. Sebagai komponen dari Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD), Dana Insentif Fiskal berfungsi sebagai bentuk insentif bagi daerah yang memperlihatkan pengelolaan keuangan yang baik (Halim, 2017).”

Dilansir dari Anwar Hafid Official Site yang bersumber dari Parlemenaria dpr.go.id, Anwar Hafid yang merupakan anggota komisi II DPR RI memberikan komentar terhadap penurunan insentif secara tajam yang dialami oleh Kota Sukabumi pada tahun 2022. Menurut Anwar Hafid, penilaian terhadap penerimaan dana insentif masih bersifat subjektif, terkhusus pada penilaian inovasi daerah. Akibat subjektivitas penilaian ini, sejumlah pemerintah di Indonesia mengalami kesusahan dalam menekankan ekonomi sehingga banyak sekali sebagian Kabupaten/Kota di Indonesia selain Kota Sukabumi yang tidak meraih atau mengalami penurunan terhadap dana insentif. Anwar Hafid menekankan pentingnya Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) serta Kementerian Keuangan (Kemenkeu) guna mengatasi masalah serta memberikan porsi penetapan dana insentif yang akuntabel.

Dilihat dari uraian diatas, penelitian terhadap penerimaan dana insentif fiskal perlu dilaksanakan dimana beberapa daerah di Indonesia terlalu fokus terhadap penilaian terhadap inovasi daerah untuk mendapatkan dana insentif. Pada “Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Republik Indonesia Nomor 167/PMK.07/2020 tentang

Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah” sudah dijelaskan terdapat aspek lain selain inovasi daerah untuk penilaian, yakni kinerja keuangan (50%), perbaikan pelayanan publik dan infrastruktur dalam kondisi itu inovasi daerah (25%), dan kesejahteraan masyarakat (25%). Dilihat dari hal tersebut, dapat dikatakan bahwa daerah terlalu fokus terhadap penilaian inovasi daerah sementara terdapat penilaian kategori lainnya, salah satunya yakni kinerja keuangan (Hidayah dkk. 2025). Oleh sebab itu, dana insentif yang diterima pemerintah daerah banyak yang mengalami penurunan, terutama pada provinsi-provinsi yang ada di Indonesia.

Pengalokasian insentif fiskal bergantung pada pencapaian pemerintah daerah. Makin baik pencapaiannya, maka akan makin besar kemungkinannya untuk mendapatkan DIF, satu di antaranta yakni capaian kinerja pengelolaan keuangan daerah dimana kinerja keuangan pemerintah daerah menjadi satu di antara kriteria untuk mendapatkan DIF dalam kategori kinerja pengelolaan keuangan daerah. Dalam melihat laporan keuangan untuk mencerminkan kinerja yang baik, dapat dilihat melalui Rasio Kemandirian, Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Rasio Efisiensi Belanja, serta Rasio Efisiensi Keuangan.

Penelitian mengenai pengaruh rasio kemandirian, efektivitas PAD, serta pengelolaan belanja daerah pada kinerja keuangan sudah diteliti oleh Anynda & Hermanto (2020). Penelitian tersebut menyimpulkan yakni tingkat kemandirian dan efektivitas PAD suatu daerah menyumbang pengaruh pada kinerja keuangan daerahnya. Berlandaskan kategori penilaian DIF, dengan kinerja keuangan yang baik yang diukur melalui rasio kemandirian, maka dapat memengaruhi penerimaan insentif fiskal. Kondisi itu didukung oleh penelitian Septiani & Gamayuni (2023) dan Hidayah dkk. (2025) dengan hasil rasio kemandirian menyumbang pengaruh positif terhadap DIF.

Studi yang dilaksanakan oleh Anynda & Hermanto (2021) mengkaji dampak pengelolaan belanja daerah pada kinerja keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian tersebut memperlihatkan terkait efektivitas dan efisiensi pada pengeluaran daerah memberikan pengaruh positif pada kinerja keuangan daerah. Temuan ini selaras pada penelitian yang dilaksanakan Septiani & Gamayuni (2023) serta Hidayah dkk. (2025) yang mengemukakan bahwa rasio efisiensi belanja menyumbang pengaruh positif untuk mendapat insentif fiskal.

Dalam studi yang dilaksanakan Fathah (2017) tentang “Analisis Rasio Keuangan untuk Penilaian Kinerja pada Pemerintah Daerah”, ditemukan bahwa rasio efisiensi keuangan mempunyai dampak pada kinerja pemerintah daerah, di mana peningkatan kinerja pemerintah dapat menyumbang pengaruh terhadap perolehan DIF. Temuan ini mendapat dukungan dari hasil penelitian Hidayah dkk. (2025) yang mengungkapkan adanya pengaruh negatif rasio efisiensi keuangan terhadap DIF, yang maksudnya bahwa makin kecil nilai rasio efisiensi keuangan, maka makin besar DIF yang dapat diraih.

Berlandaskan latar belakang yang sudah dijabarkan, penulis tertarik untuk melaksanakan penelitian yang mempunyai judul “**Pengaruh Rasio Kemandirian,**

Rasio Efektivitas PAD, Rasio Efisiensi Belanja, dan Rasio Efisiensi Keuangan terhadap Dana Insentif Fiskal pada Pemerintah Provinsi di Indonesia”.

TINJAUAN LITERATUR

Teori *Stewardship*

Teori *Stewardship* memberikan gambaran yakni manajemen tidak didorong oleh motivasi untuk mencapai kepentingan pribadi, melainkan berorientasi pada kepentingan organisasi secara keseluruhan (Donaldson & Davis, 1991). Teori *stewardship* meyakini bahwa manajemen akan bertindak untuk kepentingan publik secara umum yang menekankan pada nilai integritas, loyalitas, dan tanggung jawab pada pengelolaan organisasi.

Keberhasilan pemerintah daerah dalam meraih DIF mencerminkan adanya perilaku *steward* dalam tata kelola publik. Pemerintah daerah yang memperlihatkan transparansi, akuntabilitas, dan kinerja yang baik akan lebih dipercaya oleh pemerintah pusat, sehingga lebih berpeluang untuk mendapatkan insentif. Dalam hal ini, DIF menjadi cerminan dari hubungan kepercayaan antara pemerintah pusat dengan daerah yang dibangun atas profesionalisme dan tanggung jawab pengelolaan sumber daya publik.

Dana Insentif Fiskal

Sebagai komponen dari Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD), Dana Insentif Fiskal (DIF) berfungsi sebagai stimulus finansial untuk daerah yang mampu mengelola keuangan dengan baik (Halim, 2017:126). Pemberian DIF dimaksudkan sebagai bentuk apresiasi terhadap capaian kinerja dalam berbagai aspek seperti tata kelola keuangan daerah, penyelenggaraan layanan umum pemerintahan, penyediaan layanan dasar publik, serta upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam meraih DIF, Pemda wajib mencukupi syarat-syarat yang tersusun atas kriteria utama serta kriteria kinerja. Berlandaskan “PMK No. 160/PMK.07/2021 terkait Pengelolaan Dana Insentif Daerah, kriteria utama meliputi perolehan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK atas LKPD, ketepatan waktu untuk menetapkan Peraturan Daerah mengenai APBD, penerapan pengadaan barang/jasa secara elektronik (*e-Procurement*) pada kategori minimal B, implementasi aplikasi penganggaran berbasis elektronik (*e-Budgeting*), serta tersedianya pelayanan terpadu satu pintu.”

Di samping kriteria utama yang sudah disebutkan, terdapat sejumlah kriteria kinerja yang diatur dalam “PMK No. 167/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas PMK No. 141/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah, yang meliputi kategori kesehatan fiskal dan pengelolaan keuangan, kategori pelayanan dasar publik, kategori kesejahteraan masyarakat, kategori pengendalian inflasi, kategori pencegahan korupsi, serta kategori lainnya.”

Rasio Kemandirian

Rasio Kemandirian memperlihatkan kapasitas daerah untuk membiayai secara mandiri berbagai aktivitas pemerintahan, pembangunan, serta pelayanan kepada masyarakat tanpa bergantung pada sumber dana eksternal (Aliyah dkk.

2024). Kemandirian dianggap sebagai wujud dari sikap *steward* sehingga dapat memperlihatkan komitmen pemerintah daerah terhadap pengelolaan keuangan yang sehat dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Kondisi itu akhirnya menjadikan mereka layak untuk menerima penghargaan berupa DIF.

H1 : Rasio Kemandirian menyumbang pengaruh secara parsial terhadap DIF

Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Kemampuan pemerintah daerah untuk mencapai realisasi PAD sesuai dengan anggaran yang sudah diputuskan berlandaskan potensi daerah bisa digambarkan lewat rasio efektivitas PAD. Tingginya nilai rasio efektivitas PAD mengindikasikan bahwa pemerintah daerah mempunyai kinerja yang optimal untuk mewujudkan target PAD yang sudah ditetapkan (Mahmudi, 2019). Penerimaan PAD yang makin tinggi akan membantu pemerintah untuk menjalankan pembangunan sesuai prinsip otonomi daerah, yang pada akhirnya bisa mendorong kinerja keuangan daerah menjadi lebih baik Handayani dkk. (2024). Pemerintah daerah sebagai *steward* akan secara aktif berupaya membuat meningkat efektivitas PAD, tidak hanya untuk memenuhi target keuangan namun juga sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat. Kondisi itu pada akhirnya menciptakan kinerja keuangan yang baik dan berpotensi mendatangkan DIF dari pemerintah pusat.

H2 : Rasio Efektivitas PAD menyumbang pengaruh secara parsial terhadap DIF

Rasio Efisiensi Belanja

Pengukuran tingkat penghematan anggaran yang dilaksanakan pemerintah dapat dilaksanakan melalui rasio efisiensi belanja (Mahmudi, 2019:164). Menurut Sabrina (2018), nilai rasio efisiensi belanja yang rendah mengindikasikan yakni pemerintah daerah sudah memanfaatkan anggaran belanja secara efisien. Ketika pemerintah daerah mampu mencapai efisiensi dalam belanja daerah, kondisi itu dapat dijadikan sebagai indikator bahwa mereka sudah mengoptimalkan penggunaan alokasi anggaran, yang kemudian memenuhi persyaratan untuk meraih insentif tambahan berupa DIF.

H3 : Rasio Efisiensi Belanja menyumbang pengaruh secara parsial terhadap DIF

Rasio Efisiensi Keuangan

Rasio Efisiensi Keuangan merupakan perbandingan antara jumlah pendapatan yang berhasil diraih dengan total biaya yang dikeluarkan untuk meraih pendapatan tersebut, yang berfungsi untuk memperlihatkan tingkat efisiensi pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya keuangan serta mendukung berbagai program serta kegiatan pelayanan kepada masyarakat (Halim, 2013). Pemerintah daerah yang efisien untuk mengelola anggaran memperlihatkan integritas, akuntabilitas, dan komitmen untuk menjalankan fungsi pelayanan publik secara optimal yang bertindak bukan untuk kepentingan pribadi, tetapi untuk tercapainya tujuan bersama yang manfaatnya dirasakan oleh banyak pihak.

H4 : Rasio Efisiensi Keuangan menyumbang pengaruh secara parsial terhadap DIF

Rasio Kemandirian, Rasio Efektivitas PAD, Rasio Efisiensi Belanja, dan Rasio Efisiensi Keuangan dengan Dana Insentif Fiskal

Pemerintah pusat memberikan DIF sebagai bentuk penghargaan atas kinerja daerah yang didasarkan pada penilaian objektif terhadap indikator kinerja, termasuk kemampuan daerah untuk menggali potensi pendapatan, mencapai target PAD, serta memakai belanja secara efisien. Oleh karena itu, keempat rasio tersebut berperan penting untuk menentukan kelayakan daerah menerima insentif. Daerah yang mempunyai kinerja lebih baik pada seluruh aspek mempunyai kemungkinan lebih besar untuk meraih DIF sebagai bentuk apresiasi dari pemerintah pusat.

H5 : Rasio Kemandirian, Rasio Efektivitas PAD, Rasio Efisiensi Belanja, dan Rasio Efisiensi Keuangan menyumbang pengaruh secara simultan terhadap DIF

METODE PENELITIAN

Teknik Pengumpulan Data

Jenis data yang dipakai pada penelitian yakni data sekunder yang dikumpulkan melalui metode dokumentasi dengan memanfaatkan sumber LKPD Provinsi di Indonesia periode 2021-2023. Penelitian ini memakai pendekatan kuantitatif pada populasi semua 38 Provinsi di Indonesia. Melalui teknik *purposive sampling*, penelitian ini meraih sampel sebanyak 20 Provinsi yang menghasilkan 60 unit data penelitian. Untuk menganalisis data, penelitian ini memakai analisis regresi linear berganda pada bantuan *software* IBM SPSS Versi 26.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Statistik Deskriptif

Tabel 1. Hasil Statistik Deskriptif
 Sumber: *Output* SPSS Versi 26 (2025)

	Descriptive Statistics				
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Rasio Kemandirian	60	21,92	278,57	105,5903	68,21655
Rasio Efektivitas PAD	60	78,32	127,45	102,6632	9,28375
Rasio Efisiensi Belanja	60	79,34	97,71	91,7402	4,07163
Rasio Efisiensi Keuangan	60	83,86	122,74	99,5842	6,87620
Dana Insentif Fiskal	60	1441174000	88165762000	40350690908,33	22710973273,159
Valid N (listwise)	60				

Berlandaskan hasil statistik deskriptif, diraih bahwasanya nilai minimum DIF yakni 1441174000 atau Rp 1.441.174.000, nilai maksimum 88165762000 atau Rp 88.165.762.000, *mean* 40350690908,33 atau Rp 40.350.690.908,33, dan standar

deviasi 22710973273,159 atau Rp 22.710.973.273,159. Rasio kemandirian mempunyai nilai minimum 21,92, nilai maksimum 278,57, *mean* 105,5903 serta standar deviasi 68,21655. Rasio Efektivitas PAD mempunyai nilai minimum 78,32 nilai maksimum 127,45, *mean* 102,6632, dan standar deviasi 9,28375. Rasio Efisiensi Belanja mempunyai nilai minimum 79,34, nilai maksimum 97,71, *mean* 91,7402, dan standar deviasi 4,07163. Rasio Efisiensi Keuangan mempunyai nilai minimum 74,50, nilai maksimum 122,74, *mean* 99,5842, dan standar deviasi 6,87620.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Tabel 2. Hasil Uji Normalitas
 Sumber: *Output SPSS Versi 26 (2025)*

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		60
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	-,0000412
	Std. Deviation	2,17947E+10
Most Extreme Differences	Absolute	,061
	Positive	,061
	Negative	-,043
Test Statistic		,061
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.
 b. Calculated from data.
 c. Lilliefors Significance Correction.
 d. This is a lower bound of the true significance.

Berlandaskan tabel 2, hasil uji normalitas memakai Kolmogorov-Smirnov (K-S) didapatkan nilai *Asymp. Sig (2-tailed)* yakni 0,200. Nilai itu melampaui 0,05, maka ditegaskan yaknisanya data berdistribusi dengan normal.

Uji Multikolinearitas

Tabel 3. Hasil Uji Multikoliniearitas
 Sumber: *Output SPSS Versi 26 (2025)*

Coefficients^a

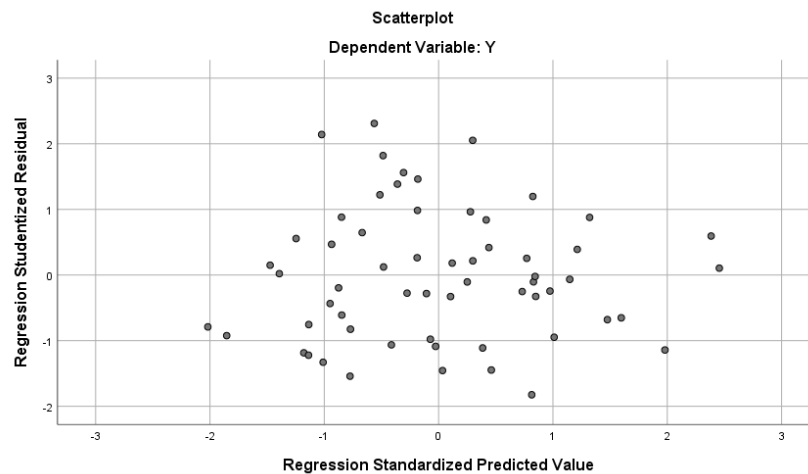
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	1,361E+11	1,985E+10		6,854	,000		
	Rasio Kemandirian	69933670,85	11733518,01	,568	5,960	,000	,843	1,187
	Rasio Efektivitas PAD	268744225,8	90797860,01	,297	2,960	,005	,760	1,316
	Rasio Efisiensi Belanja	-1176772477	196607415,6	-,571	-5,985	,000	,842	1,187
	Rasio Efisiensi Keuangan	-228234315	115775073,2	-,187	-1,971	,054	,852	1,174

a. Dependent Variable: Y

Berlandaskan tabel 3, hasil uji multikolinearitas didapatkan *tolerance value* serta VIF dari Rasio Kemandirian yakni 0,843 serta 1,187. *Tolerance value* serta VIF dari Rasio Efektivitas PAD yakni 0,760 serta 1,316. *Tolerance value* serta VIF dari

Rasio Efisiensi Belanja yakni 0,842 serta 1,187. *Tolerance value* serta VIF dari Rasio Efisiensi Keuangan yakni 0,852 serta 1,174. Semua variabel memperlihatkan *tolerance value* > 0,10 serta memperlihatkan nilai VIF < 10, maka hasil dari pengujian ini adalah tidak adanya multikolinearitas tiap variabel independen pada *regression model*.

Uji Heteroskedastisitas



Gambar 1. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Sumber: *Output SPSS Versi 26 (2025)*

Berlandaskan hasil grafik *Scatterplot* pada gambar, diketahui tidak ada pola yang teratur serta titik-titik menyebar di atas serta dibawah angka 0 pada sumbu Y. Maka, ditegaskan yakni tidak terjadi Heterokedastisitas pada *regression model*.

Uji Autokorelasi

Tabel 4. Hasil Uji Autokorelasi

Sumber: *Output SPSS Versi 26 (2025)*

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,772 ^a	,596	,566	5175382468	1,905

a. Predictors: (Constant), LAG_X4, LAG_X1, LAG_X3, LAG_X2

b. Dependent Variable: LAG_Y

Hasil pengujian yang tercantum dalam tabel 4 memperlihatkan terkait sesudah penerapan metode *Cochrane-ortcutt*, diraih nilai Durbin-Watson (DW) yakni 1,905. Dari tabel statistik Durbin-Watson, didapatkan nilai dL = 1,444, dU = 1,727, dan 4 – dU = 2,273. Suatu data dinyatakan memenuhi persyaratan uji Durbin-Watson (DW) bila nilai DU < DW < 4-DU. Pada penelitian ini, hasil perhitungan memperlihatkan 1,727 < 1,905 < 2,273, yang maksudnya kriteria tersebut sudah

terpenuhi. Berlandaskan hasil perhitungan ini, bisa ditegaskan yakni *regression model* pada penelitian ini bebas dari masalah autokorelasi baik positif ataupun negatif.

Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 5. Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda
 Sumber: *Output SPSS Versi 26 (2025)*

Coefficients ^a			
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized
	B	Std. Error	Coefficients Beta
1 (Constant)	136062065331,102	19852620327,526	
Rasio Kemandirian	69933670,848	11733518,008	,568
Rasio Efektivitas PAD	268744225,846	90797860,010	,297
Rasio Efisiensi Belanja	-1176772477,346	196607415,640	-,571
Rasio Efisiensi Keuangan	-228234315,232	115775073,210	-,187

a. Dependent Variable: Y

Berlandaskan tabel 5, diraih nilai konstanta serta koefisien regresi yang selanjutnya bisa dipakai untuk menyusun persamaan regresi linear berganda yakni:

$$\text{Dana Insentif Fiskal} = 136062065331,102 + 69933670,848\text{RK} + 268744225,846\text{REP} - 1176772477,346\text{REB} - 228234315,232\text{REK} + e$$

Persamaan regresi menjelaskan nilai konstanta 136062065331,102 memperlihatkan terkaitannya variabel independen dianggap konstan 0 maka DIF bernilai positif yakni Rp136.062.065.331,102. Nilai koefisien Rasio Kemandirian (RK) senilai 69933670,848 artinya setiap peningkatan 1% variabel tersebut maka DIF akan meningkat yakni Rp 69.933.670,848. Koefisien Rasio Efektivitas PAD (REP) yakni 268744225,846 artinya setiap peningkatan 1% variabel tersebut maka DIF akan meningkat yakni Rp 268.744.225,846. Koefisien Rasio Efisiensi Belanja (REB) senilai -1176772477,346 artinya setiap peningkatan 1% variabel tersebut maka DIF akan menurun yakni Rp 1.176.772.477,346. Koefisien Rasio Efisiensi Keuangan (REK) senilai -228234315,232 artinya setiap peningkatan 1% variabel tersebut maka DIF akan menurun yakni Rp 228.234.315,232.

Pengujian Hipotesis

Uji Koefisien Determinasi (R²)

Koefisien determinasi (R²) berfungsi sebagai indikator untuk mengetahui yakni apa kemampuan model regresi untuk menggambarkan variasi yang ada pada variabel dependen. Nilai R² berkisar pada 0 -1. Jika R² bernilai rendah, hal tersebut mencerminkan bahwasanya independen hanya memberikan kontribusi yang terbatas untuk menjelaskan fluktuasi dependen.

Tabel 6. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Sumber: *Output SPSS Versi 26 (2025)*

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,761 ^a	,579	,548	5643319684	1,319

a. Predictors: (Constant), Rasio Efisiensi Keuangan, Rasio Kemandirian, Rasio Efisiensi Belanja, Rasio Efektivitas PAD

b. Dependent Variable: Y

Hasil tabel 6 memperlihatkan nilai koefisien determinasi yakni 0.548 atau yakni 54,8% yang mencerminkan bahwasanya keseluruhan independen memberikan pengaruhnya pada dependen yakni 54,8% sementara 45,2% sisanya disumbang pengaruh oleh berbagai faktor lain yang tidak dimasukkan pada model penelitian ini.

Uji Parsial (Uji t)

Tabel 7. Hasil Uji Parsial (t)

Sumber: *Output SPSS Versi 26 (2025)*

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1,361E+11	1,985E+10		6,854	,000
	Rasio Kemandirian	69933670,85	11733518,01	,568	5,960	,000
	Rasio Efektivitas PAD	268744225,8	90797860,01	,297	2,960	,005
	Rasio Efisiensi Belanja	-1176772477	196607415,6	-,571	-5,985	,000
	Rasio Efisiensi Keuangan	-228234315	115775073,2	-,187	-1,971	,054

a. Dependent Variable: Y

Hasil pengujian untuk uji t berlandaskan tabel 7, maka dihasilkan Rasio Kemandirian mempunyai t_{hitung} yakni 5,960 > t_{tabel} 2,004 serta *significance value* yakni 0,000 < 0,05, yang maksudnya Rasio Kemandirian menyumbang pengaruh positif serta signifikan pada DIF. Rasio Efektivitas PAD mempunyai t_{hitung} yakni 2,960 > t_{tabel} 2,004 serta *significance value* yakni 0,005 < 0,05, yang maksudnya Rasio Efektivitas PAD menyumbang pengaruh positif serta signifikan pada DIF. Rasio Efisiensi Belanja mempunyai t_{hitung} yakni -5,985 > t_{tabel} 2,004 serta *significance value* yakni 0,000 < 0,05, yang maksudnya Rasio Efisiensi Belanja menyumbang pengaruh negatif serta signifikan pada DIF. Rasio Efisiensi Keuangan mempunyai t_{hitung} yakni -1,971 < t_{tabel} 2,004 serta *significance value* yakni 0,054 > 0,05, yang maksudnya Rasio Efisiensi Keuangan tidak menyumbang pengaruh terhadap DIF.

Uji Simultan (Uji Statistik F)

Tabel 8. Hasil Uji Simultan (F)
 Sumber: *Output SPSS Versi 26 (2025)*

ANOVA^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	2,406E+21	4	6,015E+20	18,888	,000 ^b
	Residual	1,752E+21	55	3,185E+19		
	Total	4,158E+21	59			

- a. Dependent Variable: Y
- b. Predictors: (Constant), Rasio Efisiensi Keuangan, Rasio Kemandirian, Rasio Efisiensi Belanja, Rasio Efektivitas PAD

Hasil Uji F didapatkan hasil F_{hitung} yakni 18,888 pada signifikansi yakni 0,000. Kondisi itu maksudnya $F_{hitung} 18,888 > F_{tabel} 2,54$ serta *significance level* $0,000 < 0,05$. Maka bisa ditegaskan bahwasanya Rasio Kemandirian, Rasio Efektivitas PAD, Rasio Efisiensi Belanja, dan Rasio Efisiensi Keuangan secara serentak menyumbang pengaruh positif serta signifikan pada DIF.

Pembahasan

Pengaruh Rasio Kemandirian terhadap Dana Insentif Fiskal

Hasil penelitian memperlihatkan Rasio Kemandirian menyumbang pengaruh positif serta signifikan pada DIF, yang maksudnya makin tinggi dan mandiri kemampuan daerah dalam membiayai kebutuhannya sendiri melalui PAD, maka makin besar peluang daerah tersebut mendapatkan DIF dari pemerintah pusat. Rasio kemandirian yang tinggi memperlihatkan otonomi fiskal yang kuat, perencanaan yang baik, serta kondisi keuangan yang sehat. Oleh karena itu, rasio kemandirian menjadi satu di antara indikator penting yang memicu pertumbuhan ekonomi serta investasi, serta membuat meningkat kinerja keuangan, yang semuanya berpotensi mendatangkan insentif dari pemerintah pusat mencakup DIF. Pemerintah sebagai *steward* menjalankan perannya untuk membuat meningkat kemandirian keuangan untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat serta membiayai pembangunan sesuai penilaian dari penerimaan DIF dalam PMK RI No. 167/PMK.07/2020 dimana kemandirian termasuk satu di antara penilaian kategori kinerja, yakni kesehatan fiskal. Kondisi itu tampak dari angka rasio kemandirian di beberapa pemerintah provinsi di Indonesia yang memperlihatkan ketika rasio kemandirian meningkat maka penerimaan DIF meningkat juga. Sebagai contoh, ketika rasio kemandirian provinsi Bali pada tahun 2021 yakni 80,94% lalu meningkat menjadi 156,97% pada tahun 2022, DIF yang diterimanya pun meningkat dari Rp37.584.263.000 tahun 2021 menjadi Rp 50.359.663.000 pada tahun 2022. Hasil penelitian ini selaras pada penelitian Septiani & Gamayuni (2023) dan Hidayah dkk.

(2025) yang memperlihatkan Rasio Kemandirian menyumbang pengaruh positif serta signifikan pada DIF.

Pengaruh Rasio Efektivitas PAD terhadap Dana Insentif Fiskal

Hasil penelitian memperlihatkan terkaitannya Rasio Efektivitas PAD menyumbang pengaruh positif serta signifikan pada variabel DIF. Efektivitas PAD menggambarkan tanggung jawab serta loyalitas pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya keuangan yang dimilikinya. Ketika target PAD berhasil dicapai, hal tersebut mencerminkan bahwa pemimpin daerah bersungguh-sungguh dalam memperkuat kemandirian fiskal serta mendukung pembangunan daerah. Oleh karena itu, pemberian insentif dari pusat merupakan bentuk apresiasi atas komitmen pemerintah daerah untuk menjalankan peran sebagai pengelola keuangan publik yang bertanggung jawab. Hasil penelitian ini selaras pada penelitian dan Permatasari & Trisnaningih (2022), Anynda & Hermanto (2020), dan Darwanis & Saputra (2014) yang menegaskan terkaitannya efektivitas PAD menyumbang pengaruh terhadap kinerja keuangan daerah yang pada akhirnya kinerja tersebut menyumbang pengaruh terhadap insentif yang diterima.

Pengaruh Rasio Efisiensi Belanja terhadap Dana Insentif Fiskal

Hasil penelitian memperlihatkan terkaitannya Rasio Efisiensi Belanja menyumbang pengaruh negatif serta signifikan pada variabel DIF. Rasio di bawah 100% memperlihatkan daerah sudah memakai anggaran dengan hemat. Kondisi itu menandakan bahwa pemerintah daerah di Indonesia sudah berhasil mengurangi pemborosan anggaran dan belanja tidak melebihi alokasi yang ditetapkan. Makin efisien penggunaan anggaran, makin baik pula pengelolaan keuangan pemerintah untuk meraih DIF. Kondisi ini memperlihatkan kepala daerah sebagai *steward* sudah bertanggung jawab menjalankan tugasnya dengan memprioritaskan efisiensi untuk kepentingan masyarakat. Hasil penelitian ini didukung oleh Pasinringi (2022) dan Hidayah dkk. (2025) yang menegaskan terkait efisiensi pada pengelolaan belanja berperan penting untuk membuat meningkat peluang mendapatkan insentif fiskal.

Pengaruh Rasio Efisiensi Keuangan terhadap Dana Insentif Fiskal

Hasil penelitian memperlihatkan terkaitannya Rasio Efisiensi Keuangan tidak menyumbang pengaruh terhadap variabel DIF. Pemerintah pusat untuk menilai kelayakan daerah untuk menerima DIF mengacu pada dua kategori penilaian, yakni kriteria utama dan kategori kinerja lainnya sesuai dengan PMK RI No. 167/PMK.07/2020. Kriteria tersebut mencakup aspek seperti kualitas pengelolaan keuangan, pelayanan dasar publik, serta capaian prioritas nasional seperti penurunan *stunting* dan pengendalian inflasi. Sementara itu, rasio efisiensi keuangan tidak termasuk dalam daftar tersebut. Kondisi itu menegaskan bahwa indikator yang terlalu umum, seperti efisiensi keuangan, kurang relevan dalam mekanisme penghargaan berbasis kinerja spesifik seperti DIF.

Nilai efisiensi keuangan bisa terlihat bagus (efisiensinya rendah) karena faktor pendapatan yang tinggi, meskipun penggunaan anggaran belum tepat sasaran. Sebaliknya, daerah yang efisiensinya tinggi bisa jadi sudah menjalankan anggarannya dengan baik namun mempunyai keterbatasan pada sisi pendapatan. Dengan kata lain,

rasio efisiensi ini tidak cukup untuk melihat kualitas kinerja yang nyata jika tidak dikaji lebih dalam. Oleh karena itu, penilaian kinerja keuangan daerah dalam pemberian DIF harus memakai indikator yang lebih spesifik seperti efektivitas PAD atau efisiensi belanja, bukan hanya mengandalkan rasio efisiensi keuangan secara umum. Harus ada indikator pendukung yang lebih mengukur keuangan secara langsung agar penilaian menjadi lebih akurat. Hasil Penelitian ini didukung penelitian Hidayah dkk. (2025) yang menyebutkan bahwa efisiensi keuangan justru menyumbang pengaruh negatif terhadap DIF. Artinya, ketika efisiensi secara angka terlihat tinggi, belum tentu suatu daerah benar-benar menjalankan anggaran secara efektif dan sesuai kebutuhan.

Pengaruh Rasio Kemandirian, Rasio Efektivitas PAD, Rasio Efisiensi Belanja Daerah, dan Rasio Efisiensi Keuangan Daerah terhadap Dana Insentif Fiskal

Temuan pada penelitian ini mengindikasikan bahwasanya Rasio Kemandirian, Rasio Efektivitas PAD, Rasio Efisiensi Belanja, serta Rasio Efisiensi Keuangan secara serentak menyumbang pengaruh positif serta signifikan pada variabel DIF. Kondisi ini merefleksikan bahwasanya ketika keempat variabel independen tersebut dikelola secara proporsional dan efektif, maka hal tersebut mencerminkan bahwasanya pemerintah sudah melaksanakan tanggung jawabnya secara optimal. Hasil ini selaras dengan temuan oleh Septiani & Gamayuni (2023) yang meraih hasil bahwa kemandirian dan efisiensi belanja menyumbang pengaruh secara simultan pada DIF, Hidayah dkk. (2025) yang menegaskan terkait kemandirian, efisiensi belanja, dan efisiensi keuangan menyumbang pengaruh secara simultan pada DIF, dan Sari & Wikarya (2021) yang menegaskan terkait efektivitas PAD menyumbang pengaruh secara simultan pada DIF.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan dari penelitian ini yakni secara parsial Rasio Kemandirian dan Rasio Efektivitas PAD menyumbang pengaruh positif serta signifikan pada DIF, Rasio Efisiensi Belanja menyumbang pengaruh negatif serta signifikan pada DIF, sementara Rasio Efisiensi Keuangan tidak menyumbang pengaruh terhadap DIF. Secara serentak, keempat variabel independen menyumbang pengaruh positif serta signifikan pada variabel dependen yakni DIF.

Saran yang dapat direkomendasikan untuk pemerintah provinsi di Indonesia yakni agar terus membuat meningkat rasio kemandirian serta rasio efektivitas PAD dengan cara menggali berbagai potensi sumber pendapatan daerah. Selain itu, pemerintah daerah juga perlu menjaga rasio efisiensi belanja serta rasio efisiensi keuangan dengan menyusun anggaran secara lebih hati-hati dan fokus pada program-program yang menjadi prioritas. Bagi peneliti selanjutnya agar bisa mempertimbangkan variabel di luar kinerja keuangan, karena pada penilaian DIF bukan hanya dilihat dari sisi keuangan saja, tetapi juga ada kriteria utama dan kategori kinerja lain seperti kategori pelayanan dasar publik, kategori kesejahteraan masyarakat, kategori pengendalian inflasi, kategori pencegahan korupsi, dan kategori lainnya yang ikut menentukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aliyah, A. Z., Zulkifli, & Oktarida, A. (2024). Determinasi Tingkat Pengungkapan Wajib Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Pulau Sumatera. In *Competitive Jurnal Akuntansi dan Keuangan* (Vol. 8, Issue 1).
- Anynda, N., & Hermanto, S. (2020). Pengaruh Rasio Kemandirian Daerah, Efektifitas Pendapatan Asli Daerah, dan Pengelolaan Belanja Daerah terhadap Kinerja Keuangan Daerah. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 9.
- Aryasi, P. P., Periansya, & Dwitayanti, Y. (2023). Pengaruh Kemandirian, Efisiensi dan Kinerja Keuangan terhadap Financial Sustainability pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Bagian Selatan. *SEIKO: Journal of Management & Business*, 6(2), 544–555.
- Darwanis, & Saputra, R. (2014). Pengaruh Belanja Modal terhadap Pendapatan Asli Daerah dan Dampaknya Pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Aceh). *Jurnal Dinamika Akuntansi Dan Bisnis*, 1(2).
- Difinubun, Y., Khaerani, A., & Fatimah, U. F. N. (2023). Financial Statement Disclosure: Satu Tinjauan Keuangan Daerah. *Financial and Accounting Indonesian Research*, 3(1), 55–63. <https://doi.org/10.36232/fair.v3i1.1349>
- Donaldson, L., & Davis, J. H. (1991). Stewardship Theory or Agency Theory: CEO Governance and Shareholder Returns. *Australian Journal of Management*, 16(1), 49–64. <https://doi.org/10.1177/031289629101600103>
- Fathah, R. N. (2017). Analisis Rasio Keuangan untuk Penilaian Kinerja pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Kidul. *EBBANK Journal*, 8(1).
- Halim, A. (2013). *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah* (Edisi ke 5). Salemba Empat.
- Halim, A. (2017). *Manajemen Keuangan Sektor Publik*. Salemba Empat.
- Handayani, L., Yulina, B., & Oktarida, A. (2024). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau. *JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi)*, 10, 3078–3090.
- Hidayah, A., AR, S., & Mayasari, R. (2025). Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Dana Insentif Fiskal Pada Pemerintah Daerah Provinsi di Indonesia. *Economic Reviews Journal (ERJ)*, 4(2).
- Mahmudi. (2019). Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. In *Edisi ke 4 STIM YKPN Yogyakarta* (Edisi ke 4).
- Pasinringi, A. M. F. (2022). *Efektivitas Pengelolaan Belanja Daerah untuk membuat meningkat Dana Insentif Daerah di Kabupaten Barru Provinsi Sulawesi Selatan*.

- Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 160/PMK.07/2021 Tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah (2021).
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 167 /PMK.07/2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah (2020).
- Permatasari, D. A., & Trisnaningsih, S. (2022). Pengaruh Kemandirian, Efektifitas Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Daerah terhadap Kinerja Keuangan Daerah. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 22(3), 1573. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v22i3.2581>
- Sabrina, D. (2018). Analisis Efisiensi dan Efektivitas Laporan Realisasi Anggaran Belanja Langsung pada Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. *Jurnal Mitra Manajemen (JMM Online)*, 2, 571–585.
- Sari, M. M., & Wikarya, U. (2021). Pemetaan Statistika Pengalokasian Dana Insentif Daerah Berlandaskan Karakteristik Daerah . *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 2.
- Septiani, P. R., & Gamayuni, R. R. (2023). Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Penerimaan Dana Insentif Daerah Pada Pemerintah Provinsi Di Indonesia. *Student Scientific Creativity Journal (SSCJ)*, 1.
- Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (2022).
- Hafid, Anwar. (2022). Anwar Hafid Dorong Kemendagri dan Kemenkeu Segera Benahi DID dan SIPD. Diakses dari *Anwar Hafid Official Site* pada 26 Mei 2025 pukul 15.00 WIB.